



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 181 /KEP/BPP/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL TAHUN 2025**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sehingga Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah wajib menyusun mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2025;



- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Layanan Publik Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah ke dalam Aplikasi SP4N LAPOR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. pengarah, bertugas;
 1. menjamin terselenggaranya pengelolaan

pengaduan pelayanan publik yang meliputi organisasi dan sumber daya manusia;

2. pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengaduan pelayanan publik.

b. penanggungjawab, bertugas:

1. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di Perangkat Daerah, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
2. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
3. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

c. ketua:

1. pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya berdasarkan indikator target koordinasi, monitoring yang ditetapkan.
2. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan

d. anggota, bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
2. merencanakan, mensinkronkan, mengonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
4. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Penanggungjawab;
5. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh penanggungjawab.

e. pengelola pengaduan, bertugas:

1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan bersangkutan;
4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
5. menyalurkan pengaduan kepada Koordinator



Pengelolaan Pengaduan Nasional, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

f. pejabat penghubung, bertugas:

1. menginformasikan pengaduan kepada kepala perangkat daerah untuk ditindaklanjuti;
2. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
3. menjawab pengaduan pada tingkat perangkat daerah;
4. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala perangkat daerah masing-masing.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan Nomor Rekening 2.16.02.2.01.05.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 April 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'John Kenedy Azis'.

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 181 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 15 APRIL 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jhon Kenedy Azis, SH.MH	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat, SE.MM	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C. R. B. C	Sekretarias Daerah	Penanggungjawab
4.	Zahirman, S.Sos, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
5.	Hendra Aswara, S.STP, MM	Inspektur Padang Pariaman	Anggota
6.	Anton Wira Tanjung, S.Pi,M.Si	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
7.	Ali Mustofa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
8.	Heri Sugianto, SH	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9.	Azwardi, A.Md	Pranata Humas Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelola Pengaduan
10.	Cun Firmansyah	Pranata Humas Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelola Pengaduan
11.	Arief Budiman Putra	IT Support Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelola Pengaduan
12.	Rendy Saputra, S. Pdi	IT Support Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelola Pengaduan
13.	Yusra Zein, S.Sos, MM	Sekretaris Inspektorat	Pejabat Penghubung
14.	Masri, S.ST, MM	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pejabat Penghubung
15.	Ardison, SE	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pejabat Penghubung
16.	Eliza, S.Sos, MM	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pejabat Penghubung
17.	Ade Mahriyal, S.IP	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Penghubung
18.	Dedi Spendri, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Penghubung

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KASIKP/DIA
KABAG.HUKUM

19.	Sri Nelis, SKM	Sekretaris Dinas Kesehatan	Pejabat Penghubung
20.	Fauzil Irawadi, ST,MT	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pejabat Penghubung
21.	Firmansyah, SIP	Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pejabat Penghubung
22.	Suhatman, S.Pd, M.Si	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pejabat Penghubung
23.	Adek Mahdalena, ST	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Pejabat Penghubung
24.	Zeta Hidayati, S.Sos	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Penghubung
25.	Nurhayati, S.SiT, MARS	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pejabat Penghubung
26.	Elfitri, SP, MM	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pejabat Penghubung
27.	Kemal Bahren Pasha, SE, Ak	Sekretaris Dinas Perhubungan	Pejabat Penghubung
28.	Andri Satria Masri,SE,ME	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Penghubung
29.	Harmen Aminuddin, SE,MM	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja dan Usaha Kecil Menengah	Pejabat Penghubung
30.	Fauzani Refdiani Azhar, S.STP,M.PA	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Pejabat Penghubung
	Amardi, ST, MT	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pejabat Penghubung
	Yen Hendri,SE.MM	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pejabat Penghubung
	Il. Eva Fatimah, MM	Sekretaris Dinas Perikanan	Pejabat Penghubung
34.	Irawati Febriani, S.Pt,M.Si	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pejabat Penghubung
35.	Zulkhailisman, S.Pt, M.Si	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pejabat Penghubung
36.	Edi Satria,SE	Kabag Umum Sekretariat DPRD Padang Pariaman	Pejabat Penghubung
37.	Sisra Putra,SE	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Penghubung
38.	Emri Nurman, S.STP, MM	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung



39.	Mirwan Karni, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
40.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
41.	Mulyadi, SP, MM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
42.	Fafdal Andrianos, ST, MPSDA	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
43.	Malis, S.Sos	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	Pejabat Penghubung
44.	Asriadi H, ST, MM	Kepala Bagian Layanan Pengaduan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
45.	Mardi, S.Sos, M. Ec. Dev	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
46.	Darmadi, SE, MM	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah	Pejabat Penghubung
47.	Gita Aprilia Fitri, S.AP	Analisis Kelembagaan Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretaris Daerah	Pejabat Penghubung
48.	Risca Dianis,SH	Kasubag Protokoler Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretaris Daerah	Pejabat Penghubung
49.	Zulbasri, S,Sos	Camat Batang Anai	Pejabat Penghubung
50.	Dion Franata, S.STP	Camat Lubuk Alung	Pejabat Penghubung
51.	Junaidi Syah, S.Sos	Camat 2x11 Kayu Tanam	Pejabat Penghubung
52.	Ir. Masarudin	Camat IV Aur Malintang	Pejabat Penghubung
53.	Yunizar, S.Sos	Camat VII Koto	Pejabat Penghubung
54.	Ir. Firman Suheri, MM	Camat V Koto Kampung Dalam	Pejabat Penghubung
55.	Y. Kayo, S.Pd	Camat V Koto Timur	Pejabat Penghubung
56.	Darwanis, SE	Camat Sungai Limau	Pejabat Penghubung
57.	Kecil Ardinata, S.Pd	Camat Sungai Geringging	Pejabat Penghubung
58.	Wirman, SE, M.P.A	Camat Patamuan	Pejabat Penghubung
59.	Rusniwita, S.Sos	Camat Sintuk Toboh Gadang	Pejabat Penghubung
60.	Efi Naldi, ST, MT	Camat Ulakan Tapakis	Pejabat Penghubung
61.	Alkhaufa, S.TP	Camat Nan Sabaris	Pejabat Penghubung
62.	Ardinal,SH	Camat 2x11 Enam Lingkung	Pejabat Penghubung



63.	Jhony Firman, SE, MM	Camat Enam Lingkung	Pejabat Penghubung
64.	Zarmiati, S.AP	Camat Padang Sago	Pejabat Penghubung
65.	Edison,S.Sos	Camat Batang Gasan	Pejabat Penghubung

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KASIKPDIASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS